



# 2025 RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN PEKALONGAN



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN



JL. ALUN ALUN UTARA NO.1 KAJEN

## KATA PENGANTAR

Segala puji kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas perkenan-Nya sehingga Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 ini dapat kami susun.

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 disusun sebagai bahan untuk penyusunan APBD Kabupaten Pekalongan dan juga digunakan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang dibiayai oleh APBD kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 ini kami menyadari tentunya tidak lepas dari berbagai kekurangan, untuk itu kami mohon saran dan masukan dari pihak – pihak yang berkepentingan guna perbaikan di masa yang akan datang.

Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Tahun 2025. Semoga dokumen ini dapat dipergunakan dan bermanfaat sebagaimana mestinya.

Kajen, 24 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEKALONGAN,  
  
M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750710 199903 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i	
DAFTAR ISI.....	ii	
DAFTAR TABEL.....	iii	
DAFTAR GAMBAR.....	iv	
BAB 1 PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang .....	I-1	
B. Landasan Hukum .....	I-2	
C. Maksud Dan Tujuan .....	I-4	
D. Sistematika .....	I-5	
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU .....		II-1
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah .....	II-1	
B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	II-29	
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	II-30	
D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	II-31	
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	II-50	
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....		III-1
A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	III-1	
B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	III-9	
C. Program Dan Kegiatan .....	III-10	
BAB IV RENCANA KERJA PROGRAM KEGIATAN DAN NOMENKLATUR .....		IV-1
BAB V PENUTUP .....		V-1
LAMPIRAN LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 .....	II-3
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Juni Tahun 2024 Kabupaten Pekalongan .....	II-9
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah .....	II-29
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Pekalongan .....	II-33
Tabel 2.5	Usulan Program Dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 .....	II-50
Tabel 3.1	Rumusan Tujuan Dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 .....	III-10
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 .....	III-15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kedudukan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan dengan Dokumen Perencanaan lainnya.....	I-1
Gambar 3.1 Tema Dan Arah Kebijakan RKP Tahun 2025 .....	III-2

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

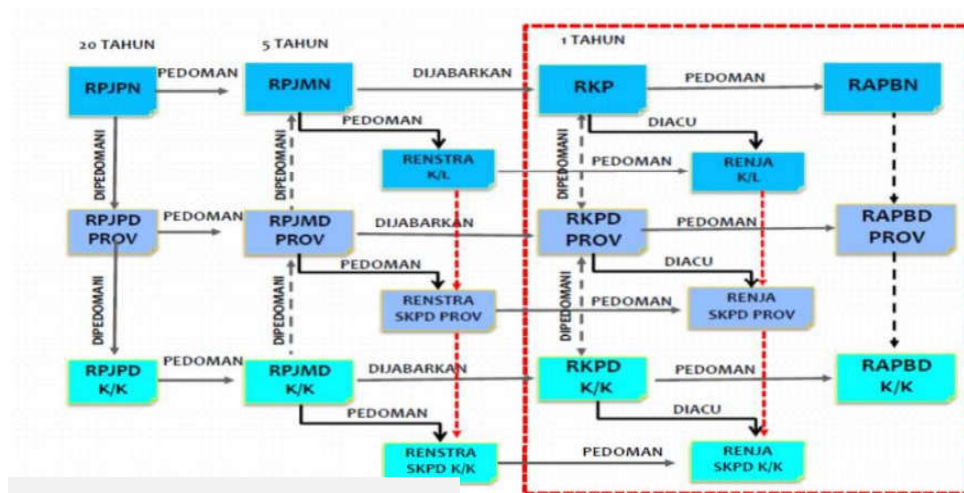
**A. Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan sebagai penjabaran dari RKPD dan Renstra Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran disertai dana yang diperlukan untuk pelaksanaannya yang disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Persiapan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah meliputi :

1. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
2. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan pedoman kepada Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu kepada RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025. Hal ini dapat dijelaskan dalam gambar di bawah ini.



Sumber : Kementerian Dalam Negeri RI, 2017

Gambar 1.1 Kedudukan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Selanjutnya Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025 dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2025.

## **B. Landasan Hukum**

Dasar hukum Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan. Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 13 )
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan. Tahun 2020 – 2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 93);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 12)
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan. Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 97);
24. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 – 2026;
25. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 Nomor 48)

### **C. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud :**

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

2. Tujuan :
  - a. Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah tahun 2021-2026;
  - b. Sebagai pedoman kerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 sebagai kendali dalam pelaksanaan tugas, sehingga tugas yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
  - c. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang;
  - d. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
  - e. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
  - f. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

**D. Sistematika**

Sistematika Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

**BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- B. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- C. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan rencana kerja dan pendanaan Sekretariat Daerah, yang merupakan matrik diprint out dari SIPD.

BAB V PENUTUP

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA**  
**SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU**

**A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah**

Rencana Kerja Sekretariat Daerah merupakan dasar utama bagi penyusunan rencana dan penganggaran tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen jangka menengah.

Kualitas penyusunan Renja Sekretariat Daerah akan sangat menentukan kualitas rencana pembangunan daerah, untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya, maka perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Sekretariat Daerah.

Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Sekretariat Daerah adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Sekretariat Daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2023 dapat dilihat dari capaian keuangan dan fisik dalam pelaksanaan kegiatan serta capaian terhadap kinerja yakni merupakan akumulasi dari capaian keuangan dan fisik. Adapun capaian evaluasi rencana kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Capaian keuangan pelaksanaan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2023 adalah sebesar 90,86%, dengan uraian sebagai berikut :

Anggaran Belanja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp. 51.522.332.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Realisasi Keuangan sebesar Rp.46.814.565.081,-. Anggaran belanja ini untuk membiayai Gaji/Tunjangan ASN dan pelaksanaan 3 Program dan 19 kegiatan serta 60 Subkegiatan. Adapun capaian keuangan program/kegiatan Sekretariat Daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

- a. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan dengan anggaran Rp. 676.000.000,- realisasi keuangan Rp. 600.993.649,- (88,90 %);
- b. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah dengan anggaran Rp. 130.000.000,-realisasi keuangan Rp. 128.475.588,- (98,83 %);
- c. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan anggaran Rp.13.842.500.000,- realisasi keuangan Rp. 10.786.558.210,- (77,92%)
- d. Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum dengan anggaran Rp.528.000.000,- realisasi keuangan Rp. 471.758.153,- (89,35%)

**2) Program Perekonomian dan Pembangunan**

- a. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dengan anggaran Rp.242.000.000,- realisasi keuangan Rp. 156.111.135,- (64,51%)
- b. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam dengan anggaran Rp. 260.000.000,- realisasi keuangan Rp. 199.988.515,- (76,92%)
- c. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan dengan anggaran Rp. 222.000.000,- realisasi keuangan Rp. 208.524.694,- (93,93%)
- d. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan anggaran Rp.541.000.000,- realisasi keuangan Rp. 538.721.985,- (99,58%)

**3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan anggaran Rp.1.981.001.890,- realisasi keuangan Rp. 1.850.186.437,- (93,40%);
- b. Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dengan anggaran Rp.2.220.000.000,- realisasi keuangan Rp. 2.204.334.963,- (99,29 %);
- c. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan anggaran Rp.2.523.998.110,- realisasi keuangan Rp. 2.508.527.170- (99,39%);

- d. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 44.000.000,- realisasi keuangan Rp. 41.505.702,- (94,33 %);
  - e. Kegiatan Penataan Organisasi dengan anggaran Rp. 480.800.000,- realisasi keuangan Rp. 425.736.307,- (88,55 %);
  - f. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 2.660.718.800,- realisasi keuangan Rp. 2.633.362.883,- (98,97%)
  - g. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp.17.469.032.000,- realisasi keuangan Rp.16.517.795.218,- (94,55%)
  - h. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran Rp.1.054.153.700,- realisasi keuangan Rp.1.030.515.130,-(97,76%)
  - i. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp. 3.437.129.600,- realisasi keuangan Rp. 3.363.510.100,- (97,86%)
  - j. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp.3.007.997.900,- realisasi keuangan Rp. 2.979.252.492,- (99,04%)
  - k. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 202.000.000,- realisasi keuangan Rp. 168.706.750,-(83,52%)
2. Capaian kinerja tahun 2023, yakni tingkat pencapaian terhadap keluaran/output yang dihasilkan dari Program/kegiatan dengan uraian pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel. 2.1. Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023

No	Program/Indikator	Target	Realisasi	Capaian Realisasi
1.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat			
a.	Persentase laporan penyelenggaraan pemerintah terkait tata pemerintahan yang tersusun	100 %	100%	100%

No	Program/Indikator	Target	Realisasi	Capaian Realisasi
	sesuai ketentuan			
a.1	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan			
	Prosentase pemenuhan dokumen bidang tata kelola pemerintahan	100 %	100 %	100 %
b.	Persentase permohonan kerja sama sesuai ketentuan yang difasilitasi	100 %	100 %	100%
b.1	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah			
	Persentase naskah kerja sama daerah yang terfasilitasi	100 %	100 %	100 %
c.	Persentase rancangan produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan	100 %	100 %	100%
c.1	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			
	Prosentase pembentukan produk hukum dan publikasinya sebagai bentuk kebijakan daerah	100 %	100 %	100 %
d.	Persentase Bina Mental Spiritual yang difasilitasi	100 %	100 %	100%
e.	Persentase Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang difasilitasi	100 %	100 %	100%
e.1	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			
	Persentase kegiatan keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat yang difasilitasi	100 %	100 %	100 %

No	Program/Indikator	Target	Realisasi	Capaian Realisasi
2.	Program Perekonomian Dan Pembangunan			
a.	Persentase laporan hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan ekonomi, SDA, BUMD dan BLUD yang tersusun	100 %	100 %	100%
b.	Persentase laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang tersusun	100 %	100 %	100%
c.	Tingkat Kematangan UKPBJ (angka)	9	8	88,89 %
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan			
a.	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	100%	100%	100%
a.1	Kegiatan Penataan Organisasi			
	Prosentase perangkat daerah berkinerjanya baik	100%	100%	100%
a.2	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%
b.	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%

No	Program/Indikator	Target	Realisasi	Capaian Realisasi
b.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Persentase ketercapaian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	100%	100%	100%
b.2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Persentase ketercapaian administrasi umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%
b.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Persentase ketercapaian jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%
b.4	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
	Prosentase pemenuhan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	100%	100%
b.5	Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			
	Prosentase bulan pemenuhan fasilitas kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%	100%	100%
b.6	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			

No	Program/Indikator	Target	Realisasi	Capaian Realisasi
	Prosentase kegiatan keprotokolan yang terfasilitasi	100%	100%	100%
c.	Persentase Pengadaan/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%
c.1	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Persentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%
c.2	Kegiatan Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%
Rata – Rata Capaian Program				98,99 %
Rata – Rata Capaian Kegiatan				100 %

### Kesimpulan

Melihat Uraian diatas, Sekretariat Daerah pada Tahun 2023 dengan 3 Program dan 11 Indikator Program, rata rata Capaian Kinerja mencapai 98,99%, ada satu indikator program yang tidak mencapai target yaitu Tingkat Kematangan UKPBJ.

Penyebab indikator ini belum sesuai target dikarenakan penilaian Tingkat Kematangan UKPBJ bersumber dari evaluasi oleh LKPP ( Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) bahwa UKPBJ Kabupaten Pekalongan dari 9 Variabel penilaian, baru 8 Variabel yang sudah memenuhi kriteria dan kurang 1 variabel yang belum memenuhi yaitu variabel manajemen pengadaan

Saat ini UKPBJ Kabupaten Pekalongan sudah memenuhi persyaratan dan data dukung untuk bisa mencukupi persyaratan variabel manajemen pengadaan.

Untuk Capaian Kinerja rata – rata capaian Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan mencapai 100 %.

Keberhasilan pencapaian ini didukung oleh para pemangku dan pengelola kegiatan menjalankan kegiatan sesuai dengan rencana kerja dan didukung adanya evaluasi rutin oleh pimpinan.

Adapun Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja 2024 dan Pencapaian Renstra Tahun 2021 – 2026 sebagaimana tercantum dalam tabel 2.2

**Tabel 2.2**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Juni Tahun 2024**  
**Kabupaten Pekalongan**

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s /d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n -2)(2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Ket.	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (TW.II Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =( 5 +7+9)	11=(10/4)		
4		<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>										
4	01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>										
4	01	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	a. Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja b. Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah c. Persentase Pengadaan/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	Bagian Organisasi, Bagian Adm. Pembangunan, Bagian Umum, Bagian Hukum
4	01	01	2.13	<b>Kegiatan Penataan Organisasi</b>	Prosentase perangkat daerah berkinerjanya baik	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	60%	Bagian Organisasi

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s /d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n -2)(2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Ket.
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (TW.II Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =( 5 +7+9)	11=(10/4)	
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	15 Dokumen	2 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	6 Dokumen	40%	Ada Perubahan Target dari Renstra yang semula 3 Dokumen pertahun menjadi 2 Dokumen (Bagian Organisasi)
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi pelayanan publik dan tatalaksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	7 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	9 Laporan	128,5%	Ada Perubahan Target dari Renstra yang semula 1 Laporan pertahun menjadi 3 Dokumen (Bagian Organisasi)

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s /d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n -2)(2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Ket.
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (TW.II Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =( 5 +7+9)	11=(10/4)	
4 01 01 2.13 03	Peningkatan kinerja dan reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 Dokumen	60%	Bagian Organisasi
4 01 01 2.13 04	Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tatalaksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	4 Dokumen	80%	Bagian Organisasi
4 01 01 2.13 05	Koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Jumlah dokumen koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	20 Dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	12 Dokumen	60%	Bagian Organisasi
4 01 01 2.01	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)</b>	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	Bagian Adm. Pembangunan
4 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	9 Dokumen	64,28%	Bagian Adm. Pembangunan

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s /d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n -2)(2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Ket.
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (TW.II Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =( 5 +7+9)	11=(10/4)	
4 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	1 laporan	3 laporan	3 laporan	100%	3 Laporan	7 Laporan	50,84%	Bagian Adm. Pembangunan
4 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	-	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	8 Laporan	50 %	Bagian Adm. Pembangunan
4 01 01 2.02	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	60%	Bagian Umum
4 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	144 Orang/bulan	144 Orang/bulan	144 Orang/bulan	144 Orang/bulan	100%	152 Orang/bulan	152 Orang/bulan	60%	Bagian Umum
4 01 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	36 Dokumen	60%	Bagian Umum

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s /d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n -2)(2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Ket.
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (TW.II Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =( 5 +7+9)	11=(10/4)	
4 01 01 2.05	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	60%	Bagian Umum, Bagian HUKum
4 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan administrasi kepegawaian	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	36 Dokumen	60%	Bagian Umum
4 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75 Orang	38 Orang	15 Orang	21 Orang	140 %	15 Orang	74 Orang	98,66%	Bagian Umum
4 01 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan	550 Orang	85 Orang	90 Orang	106 Orang	117,78%	90 orang	281 Orang	51,09%	Ada perubahan target pada tahun 2022 yang tadinya 320 orang menjadi 100 orang (Bagian Hukum)

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s /d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n -2)(2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Ket.
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (TW.II Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =( 5 +7+9)	11=(10/4)	
4 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan	560 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100%	100 orang	300 orang	53,57%	Bagian Hukum
4 01 01 2.06	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	Bagian Umum
4 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	60 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	36 Paket	60%	Bagian Umum
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	4 Paket	28 Paket	46,67%	Ada perubahan target tahun 2024 yang semula 12 Paket menjadi 4 Paket (dari Bagian Umum)
4 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	60 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	36 Paket	60%	Bagian Umum

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s /d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n -2)(2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Ket.
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (TW.II Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =( 5 +7+9)	11=(10/4)	
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket cetak penggandaan kantor yang disediakan	51 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	4 Paket	10 Paket	20 %	Ada perubahan target dari 12 Paket per tahun menjadi 3 Paket pertahun (Bagian Umum)
4 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	60%	Bagian Umum
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	60%	Bagian Umum
4 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12.500 Dokumen	180 Dok	2500 Dokumen	2500 Dokumen	100%	2500 Dokumen	5180 Dokumen	41,44%	Bagian Umum
4 01 01 2.08	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketercapaian jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100%	60%	Bagian Umum

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n -2)(2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Ket.
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (TW.II Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =( 5 +7+9)	11=(10/4)	
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	60%	Bagian Umum
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	60%	Bagian Umum
4 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	60%	Bagian Umum
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum yang disediakan	60 Laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 Laporan	60%	Bagian Umum
4 01 01 2.11	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	Prosentase pemenuhan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100%	60%	Bagian Umum, Bagian Prokompim
4 01 01 2.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	100%	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	60%	Bagian Umum
4 01 01 2.11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang/Bulan	9 Orang/Bulan	8 Orang/Bulan	8 Orang/Bulan	100%	8 Orang/Bulan	8 Orang/Bulan	60%	Bagian Prokompim

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s /d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n -2)(2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Ket.
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (TW.II Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =( 5 +7+9)	11=(10/4)	
4 01 01 2.12	<b>Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	Persentase bulan pemenuhan kebutuhan rumah tangga Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	Bagian Umum
4 01 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	60 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	36 Paket	60%	Bagian Umum
4 01 01 2.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	60 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	36 Paket	60%	Bagian Umum
4 01 01 2.07	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>	Persentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	Bagian Umum
4 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Pengadaan Mebel yang disediakan	70 Paket	50 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	5 Paket	58 Paket	82,85%	Bagian Umum
4 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	335 Unit	95 Unit	84 Unit	84 Unit	100%	60 Unit	239 Unit	71,34%	Bagian Umum
4 01 01 2.09	<b>Kegiatan Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	Bagian Umum

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s /d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n -2)(2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Ket.
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (TW.II Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =( 5 +7+9)	11=(10/4)	
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 unit	16 unit	16 unit	100%	16 Unit	16 Unit	60%	Bagian Umum
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	58 Unit	31 Unit	58 Unit	88 Unit	152 %	70 Unit	70 Unit	60%	Bagian Umum
4 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	30 Unit	30 Unit	30 Unit	134 Unit	477%	30 Unit	30 Unit	60%	Bagian Umum
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	190 unit	160 Unit	160 Unit	160 Unit	100%	160 Unit	160 Unit	60%	Bagian Umum
4 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	100%	8 Unit	8 Unit	60%	Bagian Umum
4 01 01 2.14	<b>Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	Prosentase kegiatan keprotokolan yang terfasilitasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	60%	Bagian Prokompim

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s /d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n -2)(2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Ket.
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (TW.II Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =( 5 +7+9)	11=(10/4)	
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan	5 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100 %	4 Laporan	9 Laporan	60%	Ada perubahan target dari 1 laporan per tahun menjadi 4 laporan pertahun (Bagian Prokompim)
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	5 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100 %	4 Laporan	9 Laporan	60%	Ada perubahan target dari 1 laporan per tahun menjadi 4 laporan pertahun (Bagian Prokompim)

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s /d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n -2)(2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Ket.
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (TW.II Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =( 5 +7+9)	11=(10/4)	
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (2023 -2026)	4 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100 %	4 Laporan	9 Laporan	60%	Ada perubahan target dari 1 laporan per tahun menjadi 4 laporan pertahun (Bagian Prokompim)
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	a. Persentase laporan penyelenggaraan pemerintah terkait tata pemerintahan yang tersusun sesuai ketentuan b. Persentase permohonan kerja sama sesuai ketentuan yang difasilitasi c. Persentase rancangan produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan d. Persentase Bina Mental Spiritual yang difasilitasi e. Persentase Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang difasilitasi	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	60%	Bagian Tapem, Bagian Hukum, Bagian Kesra

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s /d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n -2)(2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Ket.
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (TW.II Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =( 5 +7+9)	11=(10/4)	
4 01 02 2.01	<b>Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan)</b>	Prosentase pemenuhan dokumen bidang tata kelola pemerintahan	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	60%	Bagian Tapem
4 01 02 2.01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	5 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	2 Dokumen	4 Dokumen	80%	Bagian Tapem
4 01 02 2.01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	6 Dokumen	60 %	Ada perubahan target dari 1 Dokumen pertahun menjadi 2 dokumen pertahun (Bagian Tapem)
4 01 02 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	6 Dokumen	14 Dokumen	70%	Bagian Tapem
		Jumlah fasilitasi Pelaksanaan Pilkada	2 Kali	-	1 kali	1 kali	100 %	1 Kali	2 Kali	100 %	Bagian Tapem

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n -2)(2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Ket.
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (TW.II Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =( 5 +7+9)	11=(10/4)	
4 01 02 2.04	<b>Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah</b>	Persentase naskah kerja sama daerah yang terfasilitasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	60%	Bagian Tapem
4 01 02 2.04 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	75 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	21 Dokumen	140 %	15 Dokumen	51 Dokumen	68 %	Bagian Tapem
4 01 02 2.04 02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%	Bagian Tapem
4 01 02 2.04 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	4 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	2 Laporan	3 Laporan	75 %	Bagian Tapem
4 01 02 2.03	<b>Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum</b>	Prosentase pembentukan produk hukum dan publikasinya sebagai bentuk kebijakan daerah	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	60%	Bagian Hukum
4 01 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun	15 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	9 Dokumen	60%	Bagian Hukum

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s /d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n -2)(2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Ket.
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (TW.II Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =( 5 +7+9)	11=(10/4)	
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah kasus yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	200 Kasus	53 Kasus	17 Kasus	17 Kasus	100%	21 Kasus	81 Kasus	40,5 %	Ada perubahan target dari 40 Kaus pertahun menjadi 17 kasus pertahun karena menyesuaikan anggaran (Bagian Hukum)
		Pemenuhan Data laporan aksi HAM dan Penilaian Peduli HAM	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	-	-	-	Indikator ini sudah tidak muncul di aplikasi SIPD (Bagian Hukum)

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n -2)(2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Ket.
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (TW.II Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =( 5 +7+9)	11=(10/4)	
4 01 02 2.03 03	Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum	Jumlah Bulan dalam pengelolaan website JDIH dan arsip produk hukum daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-	Indikator ini sudah tidak muncul di aplikasi SIPD (Bagian Hukum)
		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasikan	15 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	9 Dokumen	60%	Bagian Hukum
4 01 02 2.02	<b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pemerintahan</b>	Persentase kegiatan keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat yang difasilitasi	100%	91,67%	100%	100%	100%	100%	97,22%	58,34%	Bagian Kesra
4 01 02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	31 Dokumen	7 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	15 Dokumen	48,38%	Bagian Kesra

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s /d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n -2)(2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Ket.
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (TW.II Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =( 5 +7+9)	11=(10/4)	
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen hasil Kebijakan,Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial, Transmigrasi,Kesehatan,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,Adminitrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil,Peremberdayaan Masyarakat dan Desa,Pengendalian Penduduk dan KB	34 Dokumen	6 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	15 Dokumen	44,12%	Bagian Kesra
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen hasil Kebijakan,Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga,Pariwisata,Pendidikan,Kebudayaan,Perpustakaan ,Kearsipan ,Trantibum linmas	20 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	4 Dokumen	10 Dokumen	50%	Bagian Kesra

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s /d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n -2)(2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Ket.
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (TW.II Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =( 5 +7+9)	11=(10/4)	
4 01 03	<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>	<p>a. <b>Persentase laporan hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan ekonomi, SDA, BUMD dan BLUD yang tersusun</b></p> <p>b. <b>Persentase laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang tersusun</b></p> <p>c. <b>Tingkat Kematangan UKPBJ</b></p>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	Bagian Perekonomian, Bagian Adm. Pembangunan, Bagian PBJ
			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	
			9 (angka)	8 ( angka)	9 (angka)	8 (angka)	88,89%	9 (angka)	8 (angka)	57,78%	
4 01 03 2.01	<b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	Prosentase kebijakan perekonomian daerah yang dilakukan monev	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	60%	Bagian Perekonomian
4 01 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	36 Dokumen	4 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	8 Dokumen	20 Dokumen	55,55%	Bagian Perekonomian
4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	12 Laporan	60%	Bagian Perekonomian
4 01 03 2.04	<b>Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	Prosentase kebijakan SDA yang dilakukan monev	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	Bagian Perekonomian

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n -2)(2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Ket.
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (TW.II Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =( 5 +7+9)	11=(10/4)	
4 01 03 2.04 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan,Perdagangan,Perindustrian,KUKM,Penanaman Modal,Tenaga kerja	50 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	12%	Ada perubahan target dari 12 Dokumen per tahun menjadi 2 Dokumen per tahun (Bagian Perekonomian)
4 01 03 2.04 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air,Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	12 Dokumen	60%	Bagian Perekonomian
4 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	Presentase laporan realisasi fisik seluruh OPD	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	60%	Bagian Administrasi Pembangunan
4 01 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	60%	Bagian Administrasi Pembangunan

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s /d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n -2)(2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Ket.
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (TW.II Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =( 5 +7+9)	11=(10/4)	
4 01 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	25 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	6 Laporan	16 Laporan	60%	Bagian Administrasi Pembangunan
		Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Pelaporan (SIMPEL)	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%	-	-	-	Bagian Administrasi Pembangunan
4 01 03 2.03	<b>Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	Persentase terselesaikannya tender pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	60%	Bagian PBJ
4 01 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	870 Dokumen	154 Dokumen	130 Dokumen	131 Dokumen	101%	130 Dokumen	414 Dokumen	47,58 %	Bagian PBJ
4 01 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen hasil layanan Pengadaan secara elektronik	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%	Bagian PBJ
4 01 03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan dan advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1130 Orang	170 Orang	170 Orang	170 Orang	100%	170 Orang	510 Orang	45,13%	Bagian PBJ

## **B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Sekretariat Daerah dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

### **1. Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)**

Definisi operasional Indeks Reformasi Birokrasi adalah merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (proses bisnis) dan sumber daya manusia aparatur.

Indeks ini diperoleh dari hasil Evaluasi KemenPANRB

### **2. Tingkat Kematangan Organisasi**

Definisi operasional Tingkat Kematangan Organisasi adalah hasil penilaian terhadap tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi dan inovasi yang menggambarkan tingkat kematangan organisasi perangkat daerah.

Kategori tingkat kematangan organisasi ini diperoleh dari hasil evaluasi Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah

### **3. Nilai SAKIP Kabupaten**

Definisi operasional Nilai SAKIP adalah Nilai hasil Evaluasi oleh KemenPANRB terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran yang dilaksanakan

### **4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten**

Definisi operasional Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Adapun secara rinci analisis pencapaian kinerja pelayanan Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan dapat dijelaskan dalam tabel 2.3.

**Tabel 2.3**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK / IKU	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2023 (n-2)	2024 (n-1)	2025 (n)	2026 (n+1)	2023 (n-2)	2024 (n-1)	2025 (n)	2026 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Reformasi Birokrasi	-	IKU	B (70)	B (71)	BB (73)	BB (74)	64,80	64,80*	B (65)	B (65,5)	
2	Tingkat Kematangan Organisasi	-	IKU	S (34)	S (35)	T (35)	T (37)	S (36,50)	S (36,50)*	S (36,75)	S (37)	
3	Nilai SAKIP	-	IKU	B (67)	B (70)	BB (73)	BB (75)	64,89	64,89*	B (65)	B (65,5)	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	-	IKU	78	79	80	80	83,44	83,44*	85	85	

Catatan : \* menggunakan data capaian tahun 2023, karena data terbaru masih proses evaluasi.

Dari Tabel 2.2 diatas, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Pelayanan pada Sekretariat Daerah pada Tahun 2024 masih menggunakan capaian Tahun 2023 dan 3 (tiga) indikator mengalami peningkatan dari capaian tahun sebelumnya (2022) yaitu untuk Capaian Tingkat Kematangan Organisasi, Nilai Sakip dan Indeks IKM

### C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan - permasalahan yang dihadapi dan perlu adanya pemecahan masalah oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan antara lain :

- a. Kapasitas SDM belum cukup memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah secara optimal, misalnya tenaga teknis di bidang perencanaan, tenaga pengkajian di bidang hukum, pengelolaan keuangan/akuntan, analisa jabatan/kepegawaian
- b. Regulasi dari Kementerian PAN RB yang selalu berubah – ubah sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang sudah dikeluarkan.
- c. Adanya penyetaraan eselon IV menjadi jabatan fungsional serta adanya beberapa fungsional Muda mengalami promosi jabatan menjadikan kurangnya personil untuk bisa ditunjuk sebagai Pejabat PPTK.
- d. Harapan masyarakat yang semakin tinggi atas pelayanan oleh unit – unit pelayanan sehingga memerlukan inovasi dalam pelayanan.

- e. Nilai hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Pekangan yang masih di kategori B (Baik) sehingga perlunya pemahaman yang komprehensif terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi agar nilai Evaluasinya bisa menjadi BB
- f. Adanya sistem penilaian SPIP ( Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dari BPKP dengan sistem terintegritas (e –integrity) sehingga perlu ada koordinasi dan sosialisasi terkait pengisiannya
- g. Belum optimalnya pemanfaatan standar operasional, monitoring dan evaluasi untuk mendukung pelaksanaan tupoksi
- h. Belum optimalnya penyerapan anggaran.
- i. Belum optimalnya kesadaran Perangkat Daerah dalam menginput SIRUP dan SIMPEL
- j. Belum optimalnya Sarana Prasarna yang memadai

Melihat dari permasalahan yang ada dalam rangka meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten pekalongan dimasa yang akan datang peluang dan tantangan untuk meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dengan meningkatkan pengembangan kompetensi ASN dalam rangka mendukung kinerja manajemen pemerintahan daerah melalui pelatihan, e –learning, workshop, webinar maupun diklat.
- b. Koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian PANRB, Kemendagri dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan penilaian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Melaksanakan penataan produk hukum dan meningkatkan budaya taat hukum;
- d. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien untuk optimalisasi pendayagunaan potensi daerah;
- e. Meningkatkan koordinasi bidang perencanaan dan evaluasi kinerja melalui Koordinasi konsultasi dengan provinsi ataupun daerah lain
- f. pemanfaatan standar operasional monitoring dan evaluasi untuk mendukung pelaksanaan tupoksi;
- g. Meningkatkan pendayagunaan pemanfaatan APBD sesuai dengan kebutuhan;

Dalam upaya mendorong Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan menjadi lembaga yang mampu menjalankan peran dan tupoksinya di tengah pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan secara baik, antara lain:

1. Kewenangan dan peran Sekretariat Daerah yang makin kuat dan luas dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya bidang penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
2. Semakin berkembangnya teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
3. Tuntutan stakeholders akan produk bidang penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif yang berkualitas, transparan dan partisipatif;
4. Ketersediaan perguruan tinggi/lembaga lain untuk terlibat sebagai mitra kerja dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

#### **D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal RKPD Kabupaten Pekalongan tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Daerah tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada 2.4.

Tabel 2.4  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025  
Kabupaten Pekalongan

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>				<b>42.795.988.435</b>					<b>44.445.988.435</b>	
<b>I.1</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	Persentase laporan penyelenggaraan pemerintah terkait tata pemerintahan yang tersusun sesuai ketentuan	<b>100%</b>	<b>794.000.000</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	Persentase laporan penyelenggaraan pemerintah terkait tata pemerintahan yang tersusun sesuai ketentuan	<b>100%</b>	<b>794.000.000</b>	Bagian Tapem
<b>I.1.1</b>	<b>Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan</b>	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	Prosentase pemenuhan dokumen bidang tata kelola pemerintahan	100%	650.000.000	<b>Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan</b>	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	Prosentase pemenuhan dokumen bidang tata kelola pemerintahan	100%	650.000.000	Bagian Tapem
<b>I.1.1.a</b>	Subkegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	100.000.000	Subkegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	100.000.000	Bagian Tapem
<b>I.1.1.b</b>	Subkegiatan Pengelolaan administrasi Kewilayahan	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	100.000.000	Subkegiatan Pengelolaan administrasi Kewilayahan	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	100.000.000	Bagian Tapem
<b>I.1.1.c</b>	Subkegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen	450.000.000	Subkegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen	450.000.000	Bagian Tapem

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	IndikatorKinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.2	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Persentase permohonan kerja sama sesuai ketentuan yang difasilitasi	100%	144.000.000	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Persentase permohonan kerja sama sesuai ketentuan yang difasilitasi	100%	144.000.000	Bagian Tapem
1.2.1	<b>Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Persentase naskah kerja sama daerah yang terfasilitasi	100%	144.000.000	<b>Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Persentase naskah kerja sama daerah yang terfasilitasi	100%	144.000.000	Bagian Tapem
1.2.1.a	Subkegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	15 Dokumen	100.000.000	Subkegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	15 Dokumen	100.000.000	Bagian Tapem
1.2.1.b	Subkegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	14.000.000	Subkegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	14.000.000	Bagian Tapem
1.2.1.c	Subkegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	2 Laporan	30.000.000	Subkegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	2 Laporan	30.000.000	Bagian Tapem

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	IndikatorKinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I.3	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Persentase Bina Mental Spiritual yang difasilitasi Persentase Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang difasilitasi	100% 100%	3.287.400.000 3.168.600.000	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Persentase Bina Mental Spiritual yang difasilitasi Persentase Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang difasilitasi	100% 100%	3.287.400.000 4.818.600.000	Bag.Kesra Bagian Kesra
I.3.1	<b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Persentase kegiatan keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat yang difasilitasi	100%	6.456.000.000	<b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Persentase kegiatan keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat yang difasilitasi	100%	8.106.000.000	Bagian Kesra
I.3.1.a	Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4 Dokumen	3.287.400.000	Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4 Dokumen	3.287.400.000	Bagian Kesra

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	IndikatorKinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I.3.1.b	Subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	5 Dokumen	2.906.000.000	Subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	5 Dokumen	4.556.000.000	Bagian Kesra
I.3.1.c	Subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	3 Dokumen	262.600.000	Subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	3 Dokumen	262.600.000	Bagian Kesra
I.4	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan</b>	<b>Presentase rancangan produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan</b>	<b>100 %</b>	<b>363.000.000</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan</b>	<b>Presentase rancangan produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan</b>	<b>100 %</b>	<b>363.000.000</b>	<b>Bagian Hukum</b>

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I.4.1	<b>Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Prosentase pembentukan produk hukum dan publikasinya sebagai bentuk kebijakan daerah	100 %	363.000.000	<b>Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Prosentase pembentukan produk hukum dan publikasinya sebagai bentuk kebijakan daerah	100 %	363.000.000	Bagian Hukum
I.4.1.a	Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	3 Dokumen	150.000.000	Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	3 Dokumen	150.000.000	Bagian Hukum
I.4.1.b	Subkegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	20 Kasus	150.000.000	Subkegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	20 Kasus	150.000.000	Bagian Hukum
I.4.1.c	Subkegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	3 Dokumen	63.000.000	Subkegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	3 Dokumen	63.000.000	Bagian Hukum
II.1	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	<b>Persentase laporan hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan ekonomi, SDA, BUMD dan BLUD yang tersusun</b>	<b>100%</b>	<b>706.406.400</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	<b>Persentase laporan hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan ekonomi, SDA, BUMD dan BLUD</b>	<b>100%</b>	<b>706.406.435</b>	Bagian Perekonomian
II.1.1	<b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Prosentase kebijakan perekonomian daerah yang dilakukan movev	100%	375.000.000	<b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Prosentase kebijakan perekonomian daerah yang dilakukan movev	100%	375.000.000	Bagian Perekonomian

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
II.1.1.a	Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen	160.000.000	Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen	160.000.000	Bagian Perekonomian
II.1.1.b	Subkegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	215.000.000	Subkegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	215.000.000	Bagian Perekonomian
II.1.2	<b>Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Prosentase kebijakan SDA yang dilakukan monev	100 %	331.406.435	<b>Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Prosentase kebijakan SDA yang dilakukan monev	100 %	331.406.435	Bagian Perekonomian
II.1.2.a	Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2 Dokumen	257.406.435	Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2 Dokumen	257.406.435	Bagian Perekonomian
II.1.2.b	Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	4 Dokumen	74.000.000	Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	4 Dokumen	74.000.000	Bagian Perekonomian

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
II.2	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Persentase laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang tersusun	100%	323.000.000	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Persentase laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang tersusun	100%	323.000.000	Bagian Adm. Pembangunan
II.2.1	<b>Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Presentase laporan realisasi fisik seluruh OPD	100%	323.000.000	<b>Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Presentase laporan realisasi fisik seluruh OPD	100%	323.000.000	Bagian Adm. Pembangunan
II.2.1.a	Subkegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	135.000.000	Subkegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	135.000.000	Bagian Adm. Pembangunan
II.2.1.b	Subkegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	6 Laporan	188.000.000	Subkegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	6 Laporan	188.000.000	Bagian Adm. Pembangunan
II.3	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Tingkat Kematangan UKPBJ	9 (Angka)	605.000.000	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Tingkat Kematangan UKPBJ	9 (Angka)	605.000.000	Bagian PBJ
II.3.1	<b>Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Persentase terselesaikannya tender pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	100 %	605.000.000	<b>Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Persentase terselesaikannya tender pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	100 %	605.000.000	Bagian PBJ

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Subkegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	130 Dokumen	375.000.000	Subkegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	130 Dokumen	375.000.000	Bagian PBJ
	Subkegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	175.000.000	Subkegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	175.000.000	Bagian PBJ
	Subkegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	170 Orang	55.000.000	Subkegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	170 Orang	55.000.000	Bagian PBJ
III.1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	<b>Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja</b>	<b>100 %</b>	<b>390.200.000</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	<b>Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja</b>	<b>100 %</b>	<b>390.200.000</b>	<b>Bagian Organisasi, Bagian Adm. Pembangunan</b>
III.1.1	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100 %	39.200.000	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100 %	39.200.000	Bagian Adm. Pembangunan

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	IndikatorKinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
III.1.1.a	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	28.000.000	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	28.000.000	Bagian Adm. Pembangunan
III.1.1.b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	5.600.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	5.600.000	Bagian Adm. Pembangunan
III.1.1.c	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5.600.000	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5.600.000	Bagian Adm. Pembangunan
III.1.2	<b>Kegiatan Penataan Organisasi</b>	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Prosentase perangkat daerah berkinerjanya baik	100%	351.000.000	<b>Kegiatan Penataan Organisasi</b>	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Prosentase perangkat daerah berkinerjanya baik	100%	351.000.000	Bagian Organisasi
III.1.2.a	Subkegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	80.000.000	Subkegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	80.000.000	Bagian Organisasi
III.1.2.b	Subkegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan	125.000.000	Subkegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan	125.000.000	Bagian Organisasi

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	IndikatorKinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
III.1.2.c	Subkegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	46.000.000	Subkegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	46.000.000	Bagian Organisasi
III.1.2.d	Subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Dokumen	50.000.000	Subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Dokumen	50.000.000	Bagian Organisasi
III.1.2.e	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	5 Dokumen	50.000.000	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	5 Dokumen	50.000.000	Bagian Organisasi
III.2	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan</b>	<b>Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>36.672.764.000</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan</b>	<b>Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>36.672.764.000</b>	<b>Bagian Umum, Bagian Hukum, Bagian Prokopi m</b>
III.2.1	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan</b>	<b>Persentase ketercapaian administrasi keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>18.336.382.000</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan</b>	<b>Persentase ketercapaian administrasi keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>18.336.382.000</b>	<b>Bagian Umum</b>

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
III.2.1.a	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	151 Orang/bulan	17.941.382.000	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	151 Orang/bulan	17.941.382.000	Bagian Umum
III.2.1.b	Subkegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	395.000.000	Subkegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	395.000.000	Bagian Umum
III.2.2	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Persentase ketercapaian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	100%	167.000.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Persentase ketercapaian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	100%	167.000.000	Bagian Umum, Bagian Hukum
III.2.2.a	Subkegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	59.000.000	Subkegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	59.000.000	Bagian Umum
III.2.2.b	Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	49.000.000	Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	49.000.000	Bagian Umum
III.2.2.c	Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	90 Orang	45.000.000	Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	90 Orang	45.000.000	Bagian Hukum

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
III.2.2.d	Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	100 Orang	14.000.000	Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	14.000.000	Bagian Hukum
III.2.3	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi umum Perangkat Daerah	100%	2.557.000.000	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi umum Perangkat Daerah	100%	2.557.000.000	Bagian Umum
III.2.3.a	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	85.000.000	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	85.000.000	Bagian Umum
III.2.3.b	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	210.000.000	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	210.000.000	Bagian Umum
III.2.3.c	Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	240.000.000	Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	240.000.000	Bagian Umum
III.2.3.d	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	88.000.000	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	88.000.000	Bagian Umum

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
III.2.3.e	Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.500.000.000	Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.500.000.000	Bagian Umum
III.2.3.f	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	410.000.000	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	410.000.000	Bagian Umum
III.2.3.g	Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2500 Dokumen	24.000.000	Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2500 Dokumen	24.000.000	Bagian Umum
III.2.4	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Persentase ketercapaian jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	3.530.000.000	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Persentase ketercapaian jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	3.530.000.000	Bagian Umum
III.2.4.a	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	45.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	45.000.000	Bagian Umum
III.2.4.b	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.300.000.000	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.300.000.000	Bagian Umum

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
III.2.4.c	Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	345.000.000	Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	345.000.000	Bagian Umum
III.2.4.d	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.840.000.000	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.840.000.000	Bagian Umum
III.2.5	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Prosentase pemenuhan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	1.895.000.000	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Prosentase pemenuhan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	1.895.000.000	Bagian Umum, Bagian Prokompim
III.2.5.a	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	895.000.000	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	895.000.000	Bagian Umum
III.2.5.b	Subkegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang/ Bulan	1.000.000.000	Subkegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang/ Bulan	1.000.000.000	Bagian Prokompim
III.2.6	<b>Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Prosentase pemenuhan fasilitas kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 %	2.220.000.000	<b>Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Prosentase pemenuhan fasilitas kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 %	2.220.000.000	Bagian Umum

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
III.2.6.a	Subkegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	1.275.000.000	Subkegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	1.275.000.000	Bagian Umum
III.2.6.b	Subkegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	945.000.000	Subkegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	945.000.000	Bagian Umum
III.2.7	<b>Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Prosentase kegiatan keprotokolan yang terfasilitasi	100%	1.460.000.000	<b>Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Prosentase kegiatan keprotokolan yang terfasilitasi	100%	1.460.000.000	Bagian Prokompim
III.2.7.a	Subkegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	4 Laporan	150.000.000	Subkegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	4 Laporan	150.000.000	Bagian Prokompim
III.2.7.b	Subkegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	4 Laporan	350.000.000	Subkegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	4 Laporan	350.000.000	Bagian Prokompim
III.2.7.c	Subkegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 Laporan	960.000.000	Subkegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 Laporan	960.000.000	Bagian Prokompim

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
III.3	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	100%	2.993.000.000	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	100%	2.993.000.000	Bagian Umum
III.3.1	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Persentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	490.000.000	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Persentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	490.000.000	Bagian Umum
III.3.1.a	Subkegiatan Pengadaan Mebel	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	190.000.000	Subkegiatan Pengadaan Mebel	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	190.000.000	Bagian Umum
III.3.1.b	Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27 Unit	300.000.000	Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27 Unit	300.000.000	Bagian Umum
III.3.2	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	2.503.000.000	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	2.503.000.000	Bagian Umum

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
III.3.2.a	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	650.000.000	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	650.000.000	Bagian Umum
III.3.2.b	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	70 Unit	850.000.000	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	70 Unit	850.000.000	Bagian Umum
III.3.2.c	Subkegiatan Pemeliharaan Mebel	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	75.000.000	Subkegiatan Pemeliharaan Mebel	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	75.000.000	Bagian Umum
III.3.2.d	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	160 Unit	240.000.000	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	160 Unit	240.000.000	Bagian Umum
III.3.2.e	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	688.000.000	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	688.000.000	Bagian Umum

### Kesimpulan

Melihat tabel diatas, bahwa Analisis kebutuhan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 secara rumusan program dan kegiatan telah sesuai dan memperhatikan Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 namun secara besaran anggarannya berbeda hal ini disebabkan pada tahun 2024 analisis kebutuhan pada program dan kegiatan Sekretariat Daerah mengalami peningkatan sedangkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 pagu anggarannya masih menggunakan pagu penetapan di Tahun 2024 dengan asumsi dana alokasi khusus dan pokir belum diperhitungkan

### E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan rencana kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan di diskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.

Pada forum OPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah selaku OPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan OPD Kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Tabel 2.5  
Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku Kepentingan  
Tahun 2025

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

##### **1. Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025**

Penyusunan RKPD Kabupaten Pekalongan tahun 2025 merupakan Tahun ke- 4 (empat) pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2021-2026. Target tahun keempat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bertemakan **“Penguatan Kapasitas SDM, Reformasi Birokrasi serta menciptakan Kerukunan Hidup dan Gotong Royong”** diupayakan akan tercapai melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun sebagai bentuk penjabaran RPJMD dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan,serta berpedoman juga pada program kebijakan prioritas Rencana Pembangunan Tahunan Provinsi Jawa Tengah.

Tema pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 adalah **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan ”**. RKP 2025 ini diproyeksikan sebagai respons atas perubahan global sekaligus pemenuhan mandat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

RKP 2025 akan menjadi dokumen perencanaan pada masa transisi antara RPJPN 2005-2025 dengan RPJPN 2025-2045, sekaligus penjabaran awal dari RUU RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029 sebagai Tahap Pertama Pembangunan 5 Tahunan. Visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, dalam upaya untuk mewujudkannya diperlukan dasar-dasar transformasi yang kuat. Tahapan pembangunan 2025–2029 sangat strategis untuk meletakkan dasar-dasar transformasi dan bahkan menjadi basis untuk tingkat pertumbuhan pada tahapan berikutnya, (sekaligus) menjadi window opportunity bagi kita semua untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas. Karena itu, RKP 2025 difokuskan pada penguatan fondasi transformasi.

Tema RKP 2025, diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi : Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; Infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi,percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas,

menurunkan ketimpangan dan menciptakan produk – produk yang ramah lingkungan.



Gambar 3.1 Tema dan Arah Kebijakan RKP Tahun 2025

Tema dan arah kebijakan RKP 2025 terkait erat dengan tugas fungsi serta tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah dalam mendukung misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan yang ke dua, **yaitu Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan inovatif berbasis kemajuan teknologi informasi**, dengan Sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah dan Meningkatnya efektifitas pelayanan publik yang didukung pemanfaatan teknologi informasi.

## 2. Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2025

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2025 berpedoman pada RPD Tahun 2024-2026, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada tema pembangunan daerah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah (PD) dan fokusnya sebagai berikut:

- (1) PD 1: a. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada:
  - a. Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memperbesar rasio pendapatan asli

daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah, melalui:

- 1) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata, serta meningkatkan daya saing dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
  - 2) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kelautan dan perikanan, berbasis korporasi;
  - 3) Pengelolaan dan pencegahan pemborosan pangan (food loss and waste);
  - 4) Peningkatan produktivitas pertambangan yang berwawasan lingkungan;
  - 5) Peningkatan iklim penanaman modal berbasis sektor unggulan, pengembangan industri berbasis green investment, pengembangan kawasan industri/kawasan peruntukan industri (KI/KPI), pemetaan potensi sumberdaya pendukung industri berbasis wilayah, penguatan rantai pasok sektor unggulan, pemenuhan infrastruktur keras dan lunak yang memadai, serta pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal di daerah;
  - 6) Optimalisasi sumber-sumber dan potensi pendapatan daerah, peningkatan pengelolaan keuangan daerah, serta optimalisasi sumber pembiayaan alternatif;
  - 7) Peningkatan ketentraman dan ketertiban wilayah dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah;
  - 8) Penerapan pembangunan ekonomi hijau (green economy) yang diawali dengan penyusunan dokumen pembangunan hijau di Provinsi Jawa Tengah dan ekonomi sirkular (circular economy) secara bertahap sebagai tools untuk mencapai pembangunan rendah karbon.
- b. Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar melalui:
- 1) Peningkatan pelayanan perizinan, akses permodalan, subsidi bunga, jaminan usaha, dan akses pasar bagi pelaku rintisan usaha (ultra mikro), serta penciptaan lapangan kerja yang layak;

- 2) Peningkatan rumah layak huni, peningkatan kualitas Kawasan permukiman, fasilitasi pengelolaan SPAM kabupaten/kota, pembangunan sarana prasarana SPAM perdesaan, dan fasilitasi pengelolaan air limbah domestik kabupaten/kota;
  - 3) Pemenuhan kebutuhan layanan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), pemenuhan secara bertahap kebutuhan SDM pekerja sosial, rehabilitasi prasarana dan sarana panti, peningkatan kemandirian penerima manfaat dalam panti, peningkatan ketepatan sasaran penyelenggaraan perlindungan sosial, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyelenggaraan peningkatan pendapatan kelompok fakir miskin, dan peningkatan kapasitas petugas puskesmas;
  - 4) Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah dan kewilayahan;
- c. Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan tim pengendali inflasi daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;
  - d. Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, mutu Pendidikan vokasi melalui peningkatan sarana praktek pembelajaran sesuai standar dunia usaha dan dunia industri (DUDI), kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai DUDI; pemberdayaan angkatan kerja; penempatan tenaga kerja; dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi;
  - e. Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan *database* petani dan peningkatan kompetensi dan keterampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran

Prioritas daerah ini ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah yaitu meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan, dengan indikator kinerjanya yaitu: 1) pertumbuhan ekonomi, 2) inflasi, 3) tingkat pengangguran terbuka, dan 4) nilai tukar petani.

- (2) PD 2: Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata, dengan fokus pada upaya:
- a. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang inklusif dan merata peningkatan kualitas pembelajaran berbasis *softskill* dan IT secara adaptif dan inklusif, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, penguatan pendidikan karakter menekankan pada nilai kearifan lokal, budaya literasi, budaya hidup sehat dan bugar, etos kerja, anti perundungan, diskriminasi, kesadaran mengenai kesehatan mental, serta peduli lingkungan dan tanggap bencana; Pemenuhan sarana prasarana pendidikan untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang didukung pemanfaatan teknologi informasi; serta Perluasan implementasi strategi penanganan ATS di wilayah kemiskinan ekstrem berbasis pendataan dan kerjasama multipihak;
  - b. Meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan dengan pemenuhan prasarana dan sarana, pemenuhan jumlah dan distribusi sumber daya manusia (SDM) kesehatan secara bertahap, penyusunan kebijakan, perbaikan *baseline* data, pemenuhan SOP; pemberdayaan masyarakat dalam penanganan permasalahan kesehatan; penguatan implementasi digitalisasi layanan di fasilitas kesehatan primer dan rujukan yang terhubung dengan sistem layanan provinsi; identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas SDM kesehatan; peningkatan dukungan kabupaten/kota dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular khususnya TB, malaria dan DBD, penyakit tidak menular khususnya jantung dan stroke, masalah kesehatan jiwa serta kejadian luar biasa (KLB)/krisis kesehatan; pemetaan kapasitas fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) dalam pemberian layanan prioritas untuk perluasan cakupan kesehatan semesta; revitalisasi pelaksanaan pemanfaatan pekarangan untuk pemenuhan gizi keluarga; serta pendampingan keluarga dalam penyediaan dan pengolahan pangan bergizi dan berkualitas;
  - c. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk hidup bugar, meningkatkan penyediaan sarpras olahraga memadai dan terjangkau, pembinaan dan pelatihan atlet.
  - d. Peningkatan kualitas prasarana sarana literasi dan kapasitas SDM;

- e. Peningkatan kepemimpinan, kepeloporan, dan pemberdayaan pemuda;
- f. Meningkatkan nilai-nilai budaya masyarakat melalui peningkatan perlindungan dan pengembangan warisan budaya termasuk implementasi nilai agama, serta peningkatan literasi dan ekspresi budaya dalam berbagai *platform* termasuk *platform* digital;
- g. Meningkatkan pembangunan berbasis gender melalui peningkatan kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai aspek dengan didukung ketersediaan data pilah gender;
- h. Meningkatkan ketahanan keluarga dengan penurunan kekerasan berbasis gender, serta meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak melalui fasilitasi pembentukan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) perlindungan perempuan dan anak (PPA) kabupaten/kota, penguatan jejaring penyelenggaraan pelayanan terpadu milik provinsi, peningkatan pemahaman aparat mengenai penanganan restoratif bagi pelaku dan korban kekerasan berbasis gender, pendidikan anti kekerasan sejak usia dini, pencegahan perkawinan anak melalui intervensi lintas sektor, peningkatan kualitas penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak (KLA), serta peningkatan cakupan kependudukan dan pencatatan sipil;

Prioritas daerah ini ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah yaitu meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif, dengan indikator kinerjanya yaitu: 1) indeks pembangunan manusia, 2) indeks pembangunan kebudayaan, 3) indeks pembangunan gender, dan 4) indeks pembangunan keluarga

- (3) PD 3: Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan, dengan fokus pada upaya:
  - a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan pemantauan terhadap badan air dan kualitas udara *ambien*, penyediaan sarana prasarana pengolah limbah dan persampahan (TPST Regional, IPLT Regional, TPS 3R, IPAL Komunal), peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemar air dan udara, peningkatan kapasitas kelembagaan konservasi partisipatif multipihak dan rehabilitasi

- hutan dan lahan berbasis DAS dengan peran aktif masyarakat, peningkatan kepatuhan penatausahaan hasil hutan, penguatan dan kepatuhan kelembagaan perhutanan sosial, peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim, penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon, dan penyusunan perencanaan tata ruang, serta optimalisasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. Meningkatkan ketahanan energi untuk mewujudkan transisi energi yang terjangkau dan inklusif melalui pengembangan dan pembangunan infrastruktur aneka Energi Baru Terbarukan (EBT) sesuai kewenangan provinsi, perluasan akses untuk masyarakat terhadap listrik dan energi, perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga, serta edukasi masyarakat tentang pemanfaatan energi alternatif;
  - c. Meningkatkan ketahanan sumber daya air melalui pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian sumber daya air secara berkelanjutan, peningkatan konservasi air tanah melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah serta pembangunan prasarana sarana konservasi air tanah, pengembangan SPAM Regional, serta pengurangan luasan genangan banjir, penanganan rob, dan degradasi pesisir;
  - d. Menurunkan risiko bencana melalui penyediaan kebijakan penanggulangan bencana dan dokumen perencanaan penanggulangan bencana di provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana, perluasan kemitraan untuk mobilisasi sumber daya penanggulangan bencana, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyediaan sumber literasi kebencanaan, sistem peringatan dini/*early warning system* (EWS), pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana, serta satuan pendidikan aman bencana (SPAB), pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif, peningkatan kesiapan klaster penanggulangan bencana provinsi dan kabupaten/kota, penyusunan kebijakan mekanisme transfer risiko dalam pengurangan kerugian akibat bencana, penyusunan kebijakan

perlindungan sosial adaptif, serta penguatan kebijakan pengendalian penduduk utamanya di wilayah risiko bencana tinggi. Prioritas daerah ini ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah yaitu meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan indikator kinerjanya yaitu: 1) indeks kualitas lingkungan hidup, dan 2) persentase penurunan indeks risiko bencana.

- (4) PD 4: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif, dengan fokus pada upaya:
- a. Mewujudkan birokrasi yang adaptif termasuk didalamnya penyempurnaan peta proses bisnis pemerintahan berbasis teknologi informasi, evaluasi struktur organisasi berdasarkan peta proses bisnis, pengembangan kompetensi dan kinerja ASN, memetakan kesenjangan kompetensi dan kinerja, penyelenggaraan pengembangan kompetensi tematik, serta penguatan manajemen organisasi berbasis risiko dan riset didukung dengan penyediaan data pembangunan berbasis teknologi informasi;
  - b. Mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif melalui peningkatan peran masyarakat melalui *co-creator*.

Prioritas daerah ini ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis, dengan indikator kinerjanya yaitu indeks reformasi birokrasi

Arah kebijakan dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2025 merupakan strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

- (1) PDRB per Kapita sebesar 48,53-48,66 juta rupiah;
- (2) Angka kemiskinan sebesar 9,66-9,00 persen;
- (3) Rasio Gini sebesar 0,362;
- (4) Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,90-5,60 persen;
- (5) Inflasi sebesar  $2,5 \pm 1$  persen;
- (6) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,81-4,42 persen;
- (7) Nilai Tukar Petani sebesar 107,52 persen;
- (8) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,99;
- (9) Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 59,92;
- (10) Indeks Pembangunan Gender sebesar 93,13;
- (11) Indeks Pembangunan Keluarga sebesar 58,50;
- (12) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 75,68;

- (13) Persentase penurunan Indeks Risiko Bencana sebesar 4,00 persen; dan Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 82,00

Prioritas Daerah (PD) yang keempat yaitu Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif berkaitan erat dengan Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan sasaran meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dan meningkatkan efektivitas Pelayanan Publik yang didukung Pemanfaatan Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Telaahan dan analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi apakah capaian sasaran pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (PD) berkontribusi/mendukung terhadap pencapaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Nasional dan Provinsi.

## **B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Penyusunan rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025, memperhatikan visi misi dan program kepala daerah Serta RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025.

Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 yang akan dicapai dalam satu tahun mendatang merupakan bagian dari tujuan dan sasaran Renstra yang merupakan penjabaran Tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten yang dijabarkan kedalam Visi dan Misi Bupati.

Adapun Tujuan dan Sasaran yang merupakan penjabaran dari Visi-misi Bupati yang berhubungan dengan Sekretariat daerah adalah Tujuan dan Sasaran yang terkait dengan **Misi ke 2 (Dua), yaitu Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan inovatif berbasis kemajuan teknologi informasi**, dengan Sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah dan Meningkatnya efektifitas pelayanan publik yang didukung pemanfaatan teknologi informasi.

Maka Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sekretariat Daerah pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tujuan** : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- a. Indikator Tujuan : Nilai Indeks Reformasi Kabupaten

**Sasaran:**

- a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah  
Dengan Indikator Sasaran :  
a). Nilai SAKIP Kabupaten  
b). Tingkat Kematangan Organisasi

- b. Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Publik yang didukung Pemanfaatan Teknologi Informasi  
 Dengan Indikator Sasarannya adalah : Nilai IKM Kabupaten

Adapun Rumusan Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2025 Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1  
 Rumusan Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah  
 Kabupaten Pekalongan Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target 2025
1	2	3	4
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Indeks Reformasi Birokrasi	B (65)
1.1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	B (65)
		Tingkat Kematangan Organisasi	S (36,75)
1.2	Meningkatnya efektifitas pelayanan publik yang didukung pemanfaatan teknologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	83,70

**C. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Guna mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sekretariat Daerah untuk mewujudkan Misi Bupati terpilih, maka secara garis besar rumusan program/ kegiatan Renja sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 sebanyak 3 program dan terdiri dari 19 kegiatan dan 60 Sub Kegiatan.
2. Jumlah usulan dana/ pagu indikatif untuk melaksanakan program/ kegiatan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 total sebesar Rp. 44.445.988.435,00

Kebijakan operasional dalam menunjang terwujudnya visi dan misi RPJMD Kabupaten Pekalongan, dalam Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

**a. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

- 1) Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, dengan sub kegiatan:
  - Penataan Administrasi Pemerintahan

- Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
  - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
- 2) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, dengan sub kegiatan:
- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
  - Fasilitasi Bantuan Hukum
  - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
- 3) Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah, dengan sub kegiatan:
- Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri
  - Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri
  - Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
- 4) Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, dengan sub kegiatan :
- Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
  - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
  - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat

**b. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

- 1) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
  - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub kegiatan :
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 5) Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
  - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
- 6) Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan, dengan sub kegiatan :
- Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
  - Fasilitasi Keprotokolan
  - Pendokumentasian Tugas Pimpinan
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan Mebel
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 8) Kegiatan Penataan Organisasi, dengan sub kegiatan :
- Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
  - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
  - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
  - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
- 9) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pengadaan Mebel
- 10) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 11) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

**c. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**

- 1) Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, dengan sub kegiatan:
- Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
  - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
- 2) Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, dengan sub kegiatan:
- Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
  - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
- 3) Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam, dengan sub kegiatan:
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan

- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
- 4) Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, dengan sub kegiatan:
- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
  - Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
  - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2025 Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel 3.2  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Nama perangkat daerah : Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Rencana tahun 2025 (tahun rencana)				Catatan penting	Perkiraan maju rencana tahun 2026		Unit Kerja Penanggung jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif (Rp)	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>									
04 01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>				44.445.988.435			49.777.100.000		
4 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	a. Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan, OPD se -Kabupaten Pekalongan	100%	390.200.000	APBD		100%	436.100.000	Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Organisasi
4 01 01 2.01	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	100%	39.200.000	APBD		100%	50.000.000	Bagian Administrasi Pembangunan
4 01 01 2.01 01	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	3 Dokumen	28.000.000	APBD		3 Dokumen	30.000.000	Bagian Administrasi Pembangunan

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Rencana tahun 2025 (tahun rencana)				Catatan penting	Perkiraan maju rencana tahun 2026		Unit Kerja Penanggung jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif (Rp)	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 01 01 2.01 06	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	3 Laporan	5.600.000	APBD		3 Laporan	10.000.000	Bagian Administrasi Pembangunan
4 01 01 2.01 07	Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	4 Laporan	5.600.000	APBD		4 Laporan	10.000.000	Bagian Administrasi Pembangunan
4 01 01 2.13	<b>Kegiatan Penataan Organisasi</b>	<b>Prosentase Perangkat Daerah Berkinerjanya Baik</b>	<b>OPD se - Kabupaten Pekalongan</b>	<b>100%</b>	<b>351.000.000</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>386.100.000</b>	<b>Bagian Organisasi</b>
4 01 01 2.13 01	Sub kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	OPD se - Kabupaten Pekalongan	2 Dokumen	80.000.000	APBD		2 Dokumen	88.000.000	Bagian Organisasi
4 01 01 2.13 02	Sub kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	OPD se - Kabupaten Pekalongan	3 Laporan	125.000.000	APBD		3 Laporan	137.500.000	Bagian Organisasi
4 01 01 2.13 03	Sub kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	OPD se - Kabupaten Pekalongan	2 Dokumen	46.000.000	APBD		2 Dokumen	50.600.000	Bagian Organisasi
4 01 01 2.13 04	Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	OPD se - Kabupaten Pekalongan	2 Dokumen	50.000.000	APBD		2 Dokumen	55.000.000	Bagian Organisasi

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Rencana tahun 2025 (tahun rencana)				Catatan penting	Perkiraan maju rencana tahun 2026		Unit Kerja Penanggung jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif (Rp)	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 01 01 2.13 05	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	OPD se - Kabupaten Pekalongan	5 Dokumen	50.000.000	APBD		5 Dokumen	55.000.000	Bagian Organisasi
4 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>b. Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan, OPD se - Kabupaten Pekalongan</b>	<b>100%</b>	<b>30.165.382.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>35.526.000.000</b>	<b>Bagian Umum, Bagian Hukum, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>
4 01 01 2.02	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan</b>	<b>100%</b>	<b>18.336.382.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>22.450.000.000</b>	<b>Bagian Umum</b>
4 01 01 2.02 00 01	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	151 Orang/Bulan	17.941.382.000	APBD		151 Orang/Bulan	22.000.000.000	Bagian Umum
4 01 01 2.02 04	Sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	12 Dokumen	395.000.000	APBD		12 Dokumen	450.000.000	Bagian Umum
4 01 01 2.05	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Ketercapaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</b>	<b>Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan, OPD se - Kabupaten Pekalongan</b>	<b>100%</b>	<b>167.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>260.000.000</b>	<b>Bagian Umum, Bagian Hukum</b>

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Rencana tahun 2025 (tahun rencana)				Catatan penting	Perkiraan maju rencana tahun 2026		Unit Kerja Penanggung jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif (Rp)	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 01 01 2.05 00 03	Sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	12 Dokumen	59.000.000	APBD		12 Dokumen	65.000.000	Bagian Umum
4 01 01 2.05 00 09	Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	15 Orang	49.000.000	APBD		15 Orang	70.000.000	Bagian Umum
4 01 01 2.05 00 10	Sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	OPD se - Kabupaten Pekalongan	90 Orang	45.000.000	APBD		90 Orang	70.000.000	Bagian Hukum
4 01 01 2.05 00 11	Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	OPD se - Kabupaten Pekalongan	100 Orang	14.000.000	APBD		100 Orang	55.000.000	Bagian Hukum
4 01 01 2.06	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan</b>	<b>100%</b>	<b>2.557.000.000</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>2.880.000.000</b>	<b>Bagian Umum</b>
4 01 01 2.06 00 01	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	12 Paket	85.000.000	APBD		12 Paket	95.000.000	Bagian Umum

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Rencana tahun 2025 (tahun rencana)				Catatan penting	Perkiraan maju rencana tahun 2026		Unit Kerja Penanggung jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif (Rp)	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 01 01 2.06 00	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	6 Paket	210.000.000	APBD		6 Paket	230.000.000	Bagian Umum
4 01 01 2.06 00	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	12 Paket	240.000.000	APBD		12 Paket	265.000.000	Bagian Umum
4 01 01 2.06 00	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	4 Paket	88.000.000	APBD		4 Paket	100.000.000	Bagian Umum
4 01 01 2.06 00	Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	12 Laporan	1.500.000.000	APBD		12 Laporan	1.700.000.000	Bagian Umum
4 01 01 2.06 09	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	12 Laporan	410.000.000	APBD		12 Laporan	460.000.000	Bagian Umum
4 01 01 2.06 10	Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	2500 Dokumen	24.000.000	APBD		2500 Dokumen	30.000.000	Bagian Umum
<b>4 01 01 2.08</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan</b>	<b>100%</b>	<b>3.530.000.000</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>3.940.000.000</b>	<b>Bagian Umum</b>

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Rencana tahun 2025 (tahun rencana)				Catatan penting	Perkiraan maju rencana tahun 2026		Unit Kerja Penanggung jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif (Rp)	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 01 01 2.08 00 01	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	12 Laporan	45.000.000	APBD		12 Laporan	50.000.000	Bagian Umum
4 01 01 2.08 00 02	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	12 Laporan	1.300.000.000	APBD		12 Laporan	1.500.000.000	Bagian Umum
4 01 01 2.08 00 03	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	12 Laporan	345.000.000	APBD		12 Laporan	390.000.000	Bagian Umum
4 01 01 2.08 00 04	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	12 Laporan	1.840.000.000	APBD		12 Laporan	2.000.000.000	Bagian Umum
4 01 01 2.11	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Prosentase Pemenuhan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan</b>	<b>100%</b>	<b>1.895.000.000</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>1.995.000.000</b>	<b>Bagian Umum, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>
4 01 01 2.11 01	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	2 Orang/Bulan	895.000.000	APBD		2 Orang/Bulan	895.000.000	Bagian Umum

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Rencana tahun 2025 (tahun rencana)				Catatan penting	Perkiraan maju rencana tahun 2026		Unit Kerja Penanggung jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif (Rp)	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 01 01 2.11 04	Sub kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	8 Orang/Bulan	1.000.000.000	APBD		8 Orang/Bulan	1.100.000.000	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
4 01 01 2.12	<b>Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>Prosentase Pemenuhan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan</b>	<b>100%</b>	<b>2.220.000.000</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>2.395.000.000</b>	<b>Bagian Umum</b>
4 01 01 2.12 01	Sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	12 Paket	1.275.000.000	APBD		12 Paket	1.375.000.000	Bagian Umum
4 01 01 2.12 02	Sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	12 Paket	945.000.000	APBD		12 Paket	1.020.000.000	Bagian Umum
4 01 01 2.14	<b>Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Prosentase kegiatan keprotokolan yang terfasilitasi</b>	<b>Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan</b>	<b>100%</b>	<b>1.460.000.000</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>1.606.000.000</b>	<b>Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>
4 01 01 2.14 00 01	Sub kegiatan Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	4 Laporan	150.000.000	APBD		4 Laporan	165.000.000	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Rencana tahun 2025 (tahun rencana)				Catatan penting	Perkiraan maju rencana tahun 2026		Unit Kerja Penanggung jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif (Rp)	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 01 01 2.14 00 02	Sub kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	4 Laporan	350.000.000	APBD		4 Laporan	385.000.000	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
4 01 01 2.14 00 03	Sub kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	4 Laporan	960.000.000	APBD		4 Laporan	1.056.000.000	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
4 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>c. Persentase Pengadaan/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan</b>	<b>100%</b>	<b>2.993.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>3.820.000.000</b>	<b>Bagian Umum</b>
4 01 01 2.07	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan</b>	<b>100%</b>	<b>490.000.000</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>710.000.000</b>	<b>Bagian Umum</b>
4 01 01 2.07 00 05	Sub kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	5 Unit	190.000.000	APBD		5 Unit	210.000.000	Bagian Umum
4 01 01 2.07 00 06	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	27 Unit	300.000.000	APBD		27 Unit	500.000.000	Bagian Umum

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Rencana tahun 2025 (tahun rencana)				Catatan penting	Perkiraan maju rencana tahun 2026		Unit Kerja Penanggung jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif (Rp)	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 01 01 2.09	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan</b>	<b>100%</b>	<b>2.503.000.000</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>3.110.000.000</b>	<b>Bagian Umum</b>
4 01 01 2.09 00 01	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	16 Unit	650.000.000	APBD		16 Unit	720.000.000	Bagian Umum
4 01 01 2.09 00 02	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	70 Unit	850.000.000	APBD		70 Unit	1.200.000.000	Bagian Umum
4 01 01 2.09 00 05	Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	30 Unit	75.000.000	APBD		30 Unit	90.000.000	Bagian Umum
4 01 01 2.09 00 06	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	160 Unit	240.000.000	APBD		160 Unit	350.000.000	Bagian Umum
4 01 01 2.09 00 09	Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	8 Unit	688.000.000	APBD		8 Unit	750.000.000	Bagian Umum

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Rencana tahun 2025 (tahun rencana)				Catatan penting	Perkiraan maju rencana tahun 2026		Unit Kerja Penanggung jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif (Rp)	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 01 02	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>a. Persentase laporan penyelenggaraan pemerintah terkait tata pemerintahan yang tersusun sesuai ketentuan</b>	OPD se – Kabupaten Pekalongan	100%	794.000.000	APBD		100%	745.000.000	Bagian Tata Pemerintahan
4 01 02 2.01	<b>Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>Prosentase pemenuhan dokumen bidang tata kelola pemerintahan</b>	OPD se – Kabupaten Pekalongan	100%	650.000.000	APBD		100%	560.000.000	Bagian Tata Pemerintahan
4 01 02 2.01 00	Sub kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	OPD se – Kabupaten Pekalongan	2 Dokumen	100.000.000	APBD		2 Dokumen	130.000.000	Bagian Tata Pemerintahan
4 01 02 2.01 00	Sub kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	OPD se – Kabupaten Pekalongan	2 Dokumen	100.000.000	APBD		2 Dokumen	130.000.000	Bagian Tata Pemerintahan
4 01 02 2.01 00	Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	OPD se – Kabupaten Pekalongan	5 Dokumen	450.000.000	APBD		5 Dokumen	300.000.000	Bagian Tata Pemerintahan
4 01 02	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>b. Prosentase permohonan kerja sama sesuai ketentuan yang difasilitasi</b>	OPD se – Kabupaten Pekalongan	100%	144.000.000	APBD		100%	185.000.000	Bagian Tata Pemerintahan

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Rencana tahun 2025 (tahun rencana)				Catatan penting	Perkiraan maju rencana tahun 2026		Unit Kerja Penanggung jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif (Rp)	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04 01 02 2.04	<b>Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>Persentase Naskah Kerjasama Daerah yang terfasilitasi</b>	<b>OPD se – Kabupaten Pekalongan</b>	<b>100%</b>	<b>144.000.000</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>185.000.000</b>	<b>Bagian Tata Pemerintahan</b>
04 01 02 2.04 00 01	Sub kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	OPD se – Kabupaten Pekalongan	15 Dokumen	100.000.000	APBD		15 Dokumen	130.000.000	Bagian Tata Pemerintahan
04 01 02 2.04 00 02	Sub kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	OPD se – Kabupaten Pekalongan	1 Dokumen	14.000.000	APBD		1 Dokumen	20.000.000	Bagian Tata Pemerintahan
04 01 02 2.04 00 03	Sub kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	OPD se – Kabupaten Pekalongan	2 Laporan	30.000.000	APBD		2 Laporan	35.000.000	Bagian Tata Pemerintahan
4 01 02	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>c. Presentase rancangan produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan</b>	<b>OPD se – Kabupaten Pekalongan</b>	<b>100%</b>	<b>363.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>625.000.000</b>	<b>Bagian Hukum</b>
4 01 02 2.03	<b>Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Prosentase pembentukan produk hukum dan publikasinya sebagai bentuk kebijakan daerah</b>	<b>OPD se – Kabupaten Pekalongan</b>	<b>100%</b>	<b>363.000.000</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>625.000.000</b>	<b>Bagian Hukum</b>

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Rencana tahun 2025 (tahun rencana)				Catatan penting	Perkiraan maju rencana tahun 2026		Unit Kerja Penanggung jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif (Rp)	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 01 02 2.03 00 01	Sub kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	OPD se – Kabupaten Pekalongan	3 Dokumen	150.000.000	APBD		3 Dokumen	250.000.000	Bagian Hukum
4 01 02 2.03 00 02	Sub kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	OPD se – Kabupaten Pekalongan	20 Kasus	150.000.000	APBD		20 Kasus	250.000.000	Bagian Hukum
4 01 02 2.03 00 03	Sub kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	OPD se – Kabupaten Pekalongan	3 Dokumen	63.000.000	APBD		3 Dokumen	125.000.000	Bagian Hukum
4 01 02	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>d. Persentase Bina Mental Spiritual yang difasilitasi</b>	<b>OPD se – Kabupaten Pekalongan</b>	<b>100%</b>	<b>3.287.400.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>3.500.000.000</b>	<b>Bagian Kesejahteraan Rakyat</b>
4 01 02 2.02	<b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Persentase kegiatan keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat yang difasilitasi</b>	<b>OPD se – Kabupaten Pekalongan</b>	<b>100%</b>	<b>8.106.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>6.800.000.000</b>	<b>Bagian Kesejahteraan Rakyat</b>
4 01 02 2.02 00 01	Sub kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	OPD se – Kabupaten Pekalongan	4 Dokumen	3.287.400.000	APBD		4 Dokumen	3.500.000.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Rencana tahun 2025 (tahun rencana)				Catatan penting	Perkiraan maju rencana tahun 2026		Unit Kerja Penanggung jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif (Rp)	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 01 02	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>e. Persentase Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang difasilitasi</b>	<b>OPD se – Kabupaten Pekalongan</b>	<b>100%</b>	<b>6.733.050.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>Bagian Kesejahteraan Rakyat</b>
4 01 02 2.02	<b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Persentase kegiatan keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat yang difasilitasi</b>	<b>OPD se – Kabupaten Pekalongan</b>	<b>100%</b>	<b>8.106.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>6.800.000.000</b>	<b>Bagian Kesejahteraan Rakyat</b>
4 01 02 2.02 00	Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	OPD se – Kabupaten Pekalongan	5 Dokumen	4.556.000.000	APBD		5 Dokumen	3.000.000.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Rencana tahun 2025 (tahun rencana)				Catatan penting	Perkiraan maju rencana tahun 2026		Unit Kerja Penanggung jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif (Rp)	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 01 02 2.02 00 03	Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	OPD se – Kabupaten Pekalongan	3 Dokumen	262.600.000	APBD		3 Dokumen	300.000.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
4 01 03	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>a. Persentase laporan hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan ekonomi, SDA, BUMD dan BLUD yang tersusun</b>	<b>Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan</b>	<b>100%</b>	<b>706.406.435</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>820.000.000</b>	<b>Bagian Perekonomian</b>
4 01 03 2.01	<b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>Prosentase kebijakan Perekonomian Daerah yang dilakukan monev</b>	<b>OPD se – Kabupaten Pekalongan</b>	<b>100%</b>	<b>375.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>440.000.000</b>	<b>Bagian Perekonomian</b>
4 01 03 2.01 00 01	Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	OPD se – Kabupaten Pekalongan	4 Dokumen	160.000.000	APBD		4 Dokumen	180.000.000	Bagian Perekonomian
4 01 03 2.01 00 02	Sub kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	OPD se – Kabupaten Pekalongan	4 Laporan	215.000.000	APBD		4 Laporan	260.000.000	Bagian Perekonomian

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Rencana tahun 2025 (tahun rencana)				Catatan penting	Perkiraan maju rencana tahun 2026		Unit Kerja Penanggung jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif (Rp)	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 01 03 2.04	<b>Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>Prosentase kebijakan SDA yang dilakukan monev</b>	<b>OPD se – Kabupaten Pekalongan</b>	<b>100%</b>	<b>331.406.435</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>380.000.000</b>	<b>Bagian Perekonomian</b>
4 01 03 2.04 00	Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Usuran Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	OPD se – Kabupaten Pekalongan	2 Dokumen	257.406.435	APBD		2 Dokumen	300.000.000	Bagian Perekonomian
4 01 03 2.04 03	Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Usuran Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	OPD se – Kabupaten Pekalongan	4 Dokumen	74.000.000	APBD		4 Dokumen	80.000.000	Bagian Perekonomian
4 01 03	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>b. Persentase laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang tersusun</b>	<b>OPD se – Kabupaten Pekalongan</b>	<b>100%</b>	<b>323.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>335.000.000</b>	<b>Bagian Administrasi Pembangunan</b>
4 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Presentase laporan realisasi fisik seluruh OPD</b>	<b>OPD se – Kabupaten Pekalongan</b>	<b>100%</b>	<b>323.000.000</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>335.000.000</b>	<b>Bagian Administrasi Pembangunan</b>
4 01 03 2.02 00	Sub kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	OPD se – Kabupaten Pekalongan	12 Laporan	135.000.000	APBD		12 Laporan	135.000.000	Bagian Administrasi Pembangunan

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Rencana tahun 2025 (tahun rencana)				Catatan penting	Perkiraan maju rencana tahun 2026		Unit Kerja Penanggung jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif (Rp)	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 01 03 2.02 00 03	Sub kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	OPD se – Kabupaten Pekalongan	6 Laporan	188.000.000	APBD		6 Laporan	200.000.000	Bagian Administrasi Pembangunan
4 01 03	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>c. Tingkat Kematangan UKPBJ</b>	<b>OPD se – Kabupaten Pekalongan</b>	<b>9 Angka</b>	<b>605.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>9 Angka</b>	<b>670.000.000</b>	<b>Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</b>
4 01 03 2.03	<b>Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Persentase terselesaikannya tender pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>OPD se – Kabupaten Pekalongan</b>	<b>100%</b>	<b>605.000.000</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>670.000.000</b>	<b>Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</b>
4 01 03 2.03 00 01	Sub kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	OPD se – Kabupaten Pekalongan	130 Dokumen	375.000.000	APBD		130 Dokumen	400.000.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
4 01 03 2.03 00 02	Sub kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	OPD se – Kabupaten Pekalongan	1 Dokumen	175.000.000	APBD		1 Dokumen	200.000.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
4 01 03 2.03 00 03	Sub kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	OPD se – Kabupaten Pekalongan	170 Orang	55.000.000	APBD		340 Orang	70.000.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 merupakan dokumen satu tahunan sebagai dasar dalam melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan serta program - program pembangunan yang dilakukan dan dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025.

Renja ini mengacu pada pemetaan nomenklatur yang telah disusun sesuai Permendagri 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah merupakan peraturan turunan serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 – 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeri ini diterbitkan berdasarkan usulan Pemerintah Daerah serta perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang – undangan yang selanjutnya ditambahkan dalam data base Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Nomenlatur Program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
SEKRETARIAT DAERAH KAB. PEKALONGAN  
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		<b>BAGIAN UMUM</b>						30.639.382.000,00								36.515.000.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						30.639.382.000,00								36.515.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						30.639.382.000,00								36.515.000.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			100 %	30.639.382.000,00								36.515.000.000,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase ketercapaian administrasi keuangan Perangkat Daerah</i>	-			100 %	18.336.382.000,00						Sekretariat Daerah	-	22.450.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				151 Orang/bulan	17.941.382.000,00	Kab. Pekalongan, Kajen, Nyamok	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	Sekretariat Daerah		22.000.000.000,00	BAGIAN UMUM	
	4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>				12 Dokumen	395.000.000,00	Kab. Pekalongan, Kajen, Nyamok	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	Sekretariat Daerah		450.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase ketercapaian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi</i>	-			100 %	108.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	Sekretariat Daerah	-	135.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				12 Dokumen	59.000.000,00	Kab. Pekalongan, Kajen, Nyamok	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	Sekretariat Daerah		65.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				15 Orang	49.000.000,00	Kab. Pekalongan, Kajen, Nyamok	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	Sekretariat Daerah		70.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase ketercapaian administrasi umum Perangkat Daerah</i>	-			100 %	2.557.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	Sekretariat Daerah	-	2.880.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	85.000.000,00	Kab. Pekalongan, Kajen, Nyamok	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	Sekretariat Daerah		95.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	1.500.000.000,00	Kab. Pekalongan, Kajen, Nyamok	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Melanjutkan smart gov ernance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	Sekretariat Daerah		1.700.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	410.000.000,00	Kab. Pekalongan, Kajen, Nyamok	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Melanjutkan smart gov ernance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	Sekretariat Daerah		460.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				2500 Dokumen	24.000.000,00	Kab. Pekalongan, Kajen, Nyamok	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Melanjutkan smart gov ernance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	Sekretariat Daerah		30.000.000,00	BAGIAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>	-			100 %	490.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	Sekretariat Daerah	-	710.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				5 Unit	190.000.000,00	Kab. Pekalongan, Kajen, Nyamok	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	Sekretariat Daerah		210.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				27 Unit	300.000.000,00	Kab. Pekalongan, Kajen, Nyamok	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	Sekretariat Daerah		500.000.000,00	BAGIAN UMUM





NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				16 Unit	650.000.000,00	Kab. Pekalongan, Kajen, Nyamok	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	Sekretariat Daerah		720.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				70 Unit	850.000.000,00	Kab. Pekalongan, Kajen, Nyamok	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	Sekretariat Daerah		1.200.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				30 Unit	75.000.000,00	Kab. Pekalongan, Kajen, Nyamok	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	Sekretariat Daerah		90.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				160 Unit	240.000.000,00	Kab. Pekalongan, Kajen, Nyamok	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	Sekretariat Daerah		350.000.000,00	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				8 Unit	688.000.000,00	Kab. Pekalongan, Kajen, Nyamok	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	Sekretariat Daerah		750.000.000,00	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	<i>Prosentase pemenuhan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>	-			100 %	895.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	kepala daerah dan wakil kepala daerah	-	895.000.000,00	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.11.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				2 Orang/Bulan	895.000.000,00	Kab. Pekalongan, Kajen, Nyamok	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	kepala daerah dan wakil kepala daerah		895.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	<i>Prosentase pemenuhan fasilitas kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</i>	-			100 %	2.220.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	Sekretariat Daerah	-	2.395.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan</i>				12 Paket	1.275.000.000,00	Kab. Pekalongan, Kajen, Nyamok	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	Sekretariat Daerah		1.375.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</i>				12 Paket	945.000.000,00	Kab. Pekalongan, Kajen, Kajen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	Sekretariat Daerah		1.020.000.000,00	BAGIAN UMUM
<b>BAGIAN TATA PEMERINTAHAN</b>								<b>794.000.000,00</b>							<b>745.000.000,00</b>	
4		<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						794.000.000,00							745.000.000,00	
	4.01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						794.000.000,00							745.000.000,00	
1.	4.01.02	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<i>Persentase laporan penyelenggaraan pemerintah terkait tata pemerintahan yang tersusun sesuai ketentuan</i>	-			100 %	794.000.000,00						-	745.000.000,00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	<i>Persentase pemenuhan dokumen bidang tata kelola pemerintahan</i>	-			100 %	650.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	OPD	-	560.000.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan</i>				2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	OPD		130.000.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan</i>				2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	OPD		130.000.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah</i>				5 Dokumen	450.000.000,00	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	OPD		300.000.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama</i>				2 Laporan	30.000.000,00	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	OPD		35.000.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
		<b>BAGIAN HUKUM</b>						<b>422.000.000,00</b>							<b>750.000.000,00</b>	
	<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						<b>422.000.000,00</b>							<b>750.000.000,00</b>	
	<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						<b>422.000.000,00</b>							<b>750.000.000,00</b>	
1.	4.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<i>Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			100 %	59.000.000,00						-	125.000.000,00	
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase ketercapaian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi</i>	-			100 %	59.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	OPD	-	125.000.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				90 Orang	45.000.000,00	Kab. Pekalongan, Kajen, Nyamok	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	OPD		70.000.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				100 Orang	14.000.000,00	Kab. Pekalongan, Kajen, Nyamok	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	OPD		55.000.000,00	BAGIAN HUKUM
2.	4.01.02	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<i>Presentase rancangan produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan</i>	-			100 %	363.000.000,00						-	625.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	<i>Prosentase pembentukan produk hukum dan publikasinya sebagai bentuk kebijakan daerah</i>	-			100 %	363.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	OPD	-	625.000.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														
			<i>Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun</i>				3 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Pekalongan, Kajen, Nyamok	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	OPD		250.000.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														
			<i>Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum</i>				20 Kasus	150.000.000,00	Kab. Pekalongan, Kajen, Nyamok	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	OPD		250.000.000,00	BAGIAN HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum														
			<i>Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi</i>				3 Dokumen	63.000.000,00	Kab. Pekalongan, Kajen, Nyamok	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	OPD		125.000.000,00	BAGIAN HUKUM
		<b>BAGIAN ORGANISASI</b>						<b>351.000.000,00</b>							<b>386.100.000,00</b>	
	<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						<b>351.000.000,00</b>							<b>386.100.000,00</b>	
	<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						<b>351.000.000,00</b>							<b>386.100.000,00</b>	
1.	4.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<i>Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja</i>	-			100 %	351.000.000,00						-	386.100.000,00	
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	<i>Prosentase perangkat daerah berkinerjanya baik</i>	-			100 %	351.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	OPD	-	386.100.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan</i>				2 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Pekalongan, Kajen, Kajen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	OPD		88.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana</i>				3 Laporan	125.000.000,00	Kab. Pekalongan, Kajen, Kajen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	OPD		137.500.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi</i>				2 Dokumen	46.000.000,00	Kab. Pekalongan, Kajen, Kajen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	OPD		50.600.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana</i>				2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Pekalongan, Kajen, Kajen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	OPD		55.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI	
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah</i>				5 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Pekalongan, Kajen, Kajen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	OPD		55.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI	
		<b>BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>							<b>362.200.000,00</b>							<b>385.000.000,00</b>	
	<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						<b>362.200.000,00</b>								<b>385.000.000,00</b>	
	<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						<b>362.200.000,00</b>								<b>385.000.000,00</b>	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja</i>	-			100 %	39.200.000,00						-	50.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu</i>	-			100 %	39.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	Sekretariat Daerah	-	50.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				3 Dokumen	28.000.000,00	Kab. Pekalongan, Kajen, Nyamok	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	Sekretariat Daerah		30.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				3 Laporan	5.600.000,00	Kab. Pekalongan, Kajen, Nyamok	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	Sekretariat Daerah		10.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				4 Laporan	5.600.000,00	Kab. Pekalongan, Kajen, Nyamok	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	Sekretariat Daerah		10.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
2.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	<i>Persentase laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang tersusun</i>	-			100 %	323.000.000,00						-	335.000.000,00	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	<i>Presentase laporan realisasi fisik seluruh OPD</i>	-			100 %	323.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	OPD	-	335.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan</i>				12 Laporan	135.000.000,00	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	OPD		135.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan</i>				6 Laporan	188.000.000,00	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	OPD		200.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		<b>BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>							<b>8.106.000.000,00</b>						<b>6.800.000.000,00</b>	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						8.106.000.000,00							6.800.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						8.106.000.000,00							6.800.000.000,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<i>Persentase Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang difasilitasi</i>	-			100 %	8.106.000.000,00						-	6.800.000.000,00	



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas</i>				3 Dokumen	262.600.000,00	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	OPD		300.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		<b>BAGIAN PEREKONOMIAN</b>						<b>706.406.435,00</b>							<b>820.000.000,00</b>	
	<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						<b>706.406.435,00</b>							<b>820.000.000,00</b>	
	<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						<b>706.406.435,00</b>							<b>820.000.000,00</b>	
1.	<b>4.01.03</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<i>Persentase laporan hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan ekonomi, SDA, BUMD dan BLUD yang tersusun</i>	-			<b>100 %</b>	<b>706.406.435,00</b>						-	<b>820.000.000,00</b>	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	<i>Prosentase kebijakan perekonomian daerah yang dilakukan movev</i>	-			100 %	375.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	OPD	-	440.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD</i>				4 Dokumen	160.000.000,00	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	OPD		180.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian</i>				4 Laporan	215.000.000,00	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	OPD		260.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	<i>Prosentase kebijakan SDA yang dilakukan movev</i>	-			100 %	331.406.435,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	OPD	-	380.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja</i>				2 Dokumen	257.406.435,00	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	OPD		300.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN	
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air															
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan</i>				4 Dokumen	74.000.000,00	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	OPD		80.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN	
		<b>BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>							<b>605.000.000,00</b>							<b>670.000.000,00</b>	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						605.000.000,00								670.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						605.000.000,00								670.000.000,00	
1.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	<i>Tingkat Kematangan UKPBJ</i>	-			9 Angka	605.000.000,00						-	670.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	<i>Persentase terselesaikannya tender pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</i>	-			100 %	605.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	OPD	-	670.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>				130 Dokumen	375.000.000,00	Kab. Pekalongan, Kajen, Nyamok	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	OPD		400.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik</i>				1 Dokumen	175.000.000,00	Kab. Pekalongan, Kajen, Nyamok	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	OPD		200.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</i>				170 Orang	55.000.000,00	Kab. Pekalongan, Kajen, Nyamok	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	OPD		70.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
<b>BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN</b>								<b>2.460.000.000,00</b>							<b>2.706.000.000,00</b>	
<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>							<b>2.460.000.000,00</b>							<b>2.706.000.000,00</b>	
<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>							<b>2.460.000.000,00</b>							<b>2.706.000.000,00</b>	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			100 %	2.460.000.000,00						-	2.706.000.000,00	
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	<i>Prosentase pemenuhan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>	-			100 %	1.000.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	kepala daerah dan wakil kepala daerah	-	1.100.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan</i>				4 Laporan	350.000.000,00	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemertintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Melanjutkan smart gov ernance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	Sekretariat Daerah		385.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan														
			<i>Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan</i>				4 Laporan	960.000.000,00	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemertintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Melanjutkan smart gov ernance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	Sekretariat Daerah		1.056.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
			<b>JUMLAH</b>					<b>44.445.988.435,00</b>							<b>49.777.100.000,00</b>	

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025. Substansi Renja disusun sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017, yaitu memuat kebijakan, program, kegiatan dan lokasi kegiatan dalam pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah kabupaten maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Substansi Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 disusun terukur dengan berpedoman pada arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 dan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026.
2. Tindak lanjut alokasi anggaran Sekretariat Daerah atas proses penganggaran yang tidak sesuai dengan dokumen Renja, maka akan berpengaruh pada tingkat capaian target yang telah ditetapkan.
3. Bagian - Bagian dan semua unsur teknis pelaksana kerja pada Sekretariat Daerah, agar segera menyusun rencana kinerja masing-masing dengan mengacu pada Renja yang telah ditetapkan.
4. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk setiap program dan kegiatan didasarkan pada Renja yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran;
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2025

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Sekretariat Daerah. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2025, selain dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai juga diperlukan kompetensi, semangat, tekad dan kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Harapan kami, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025, menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 serta dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan Sekretariat Daerah dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government) maupun pemerintahan yang bersih (Clean Government) di Pemerintah Kabupaten Pekalongan sehingga dapat lebih akuntabel dan transparan.

Kajen, 24 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEKALONGAN,



M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750710 199903 1 008



# PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Alun-alun Utara Nomor 1 Kajen Pekalongan Kode Pos 51161  
Telp. (0285) 381000 - 381001 Fax. (0285) 381006 Website  
<http://www.pekalongankab.go.id>

## KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 100.1.6/00179 TAHUN 2024

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025

#### SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

Menimbang: a. bahwa sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan guna tertib administrasi dan kelancaran penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025, perlu dibentuk tim penyusun;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 114);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 85);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 95);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 97);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. menginventarisir dan menyiapkan data sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan;
  - b. mengkaji dan meneliti bahan dan data yang disajikan untuk penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan;
  - c. melaksanakan koordinasi intern tim penyusun dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan;
  - d. merumuskan kebijakan guna kelancaran penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan;
  - e. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan tugas penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajen  
pada tanggal 22 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEKALONGAN,



Tembusan; disampaikan kepada, Yth.:

1. Bupati Pekalongan;
2. Wakil Bupati Pekalongan;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Pekalongan;
4. Inspektur Kab. Pekalongan;
5. Kepala Bappeda Litbang Kab. Pekalongan;
6. Tim yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah  
 Nomor : 100.1.6/00179  
 Tanggal : 22 Februari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025

NO.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si. NIP. 19750710 199903 1 008	Sekretaris Daerah	Pengarah
2	WAHYU KUNCORO, S.T., M.T. NIP. 19700418 199703 1 004	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda	Ketua
3	ANIS ROSIDI, S.Sos., M.Si. NIP. 19691114 199603 1 005	Asisten Administrasi Umum Sekda	Wakil Ketua
4	EKA IMAN PRABAWA, S.H., M.Eng NIP. 19711225 199803 1 009	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda	Sekretaris
5	DIAH YUNIARTI, S.T. NIP. 19810605 200604 2 016	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda	Anggota
6	TITIS PURWANING, S.AP NIP. 19810424 201001 2 027	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Organisasi Setda	Anggota
7	NAILATUL HASANAT, S.Sos. NIP. 19770325 200902 2 007	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Setda	Anggota
8	TANTI HARINI, S.H. NIP. 19791024 201001 2 010	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda	Anggota
10	GALUH AJENG HANJAYA, S.E. NIP. 19940928 202012 2 035	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda	Anggota
11	INES FIERA WIJAYANTI, S.Sos. NIP. 19950211 202012 2 017	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda	Anggota
12	MUHAMMAD YUSUF, S.M. NIP. 19800408 200502 1 006	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Umum Setda	Anggota
13	WAHYU ARI YUWONO, S.E. NIP. 19880508 201502 1 002	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Anggota
15	DITA SHAPTUTI, S.Kom. NIP. 19920208 201502 2 002	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda	Anggota
16	DAYANTI BUDHI ASTUTI, S.Kom. NIP. 19930427 201502 2 001	Penelaah Informasi dan Komunikasi Publik pada Bagian Perekonomian Setda	Anggota

